

TESIS

**PENGEMBANGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000
BERDASARKAN HASIL ANALISIS JABATAN**



LILIK ENDAHWATI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PENGEMBANGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR SESUAI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000
BERDASARKAN HASIL ANALISIS JABATAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pada Program PascaSarjana Universitas Airlangga**



Oleh:

LILIK ENDAHWATI

NIM. 090014066 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 25 Pebruari 2004

**M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 25 FEBRUARI 2004**

Oleh

Pembimbing Ketua



Dr. Widodo J. Pujirahardjo, MS., MPH., Dr. PH

NIP. 130 610 101

Pembimbing



Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M. Kes

NIP. 131760381

ability yang mantap, (3) *communication ability* yang efektif, (4) *moral virtues* yang tinggi, (5) *good judgment*, dan (6) kaya akan *initiative*

Berbagai aspek yang diperlukan agar supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik yaitu diperlukan dukungan tata laksana kerja yang mantap melalui berbagai pendekatan manajemen, seperti: uraian dan pembagian tugas yang jelas baik di jajaran struktural maupun staf, prosedur tetap dalam setiap pelaksanaan tugas, dan tata hubungan kerja yang didukung oleh sistem komunikasi yang baik. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terus menerus untuk menilai efektifitas organisasi.



RINGKASAN

Pengembangan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan

Lilik Endahwati

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah organisasi yang bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan di Jawa Timur selain Kantor Wilayah Departemen Kesehatan terdapat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Setelah dicanangkannya otonomi daerah, telah dibentuk organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000. Penyusunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan melalui analisis jabatan. Pendekatan yang dipakai lebih kearah akomodatif terhadap dua instansi sebelumnya yaitu Kanwil Depkes dan Dinas Kesehatan Daerah, dengan harapan dapat menampung jabatan yang ada semaksimal mungkin. Penyusunan struktur organisasi lebih banyak mengacu pada Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000), sedangkan mengenai kewenangan provinsi dalam bidang kesehatan diusahakan masuk dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai struktur organisasi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (menggantikan PP 84 tahun 2000) dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan reaksi pro dan kontra dari kalangan birokrat serta menimbulkan keresahan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa terancam nasibnya dengan perampangan ini. PP 8/2000 mempunyai ruh dan semangat yang kuat terhadap efisiensi dalam penyelenggaraan kewenangan oleh daerah. Tujuan kuantitatif restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 8/2003 adalah pengurangan jumlah dinas dan jumlah pembidangan dalam satu dinas. Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya 10 Dinas, kecuali Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya 14 Dinas. Besarnya bidang dalam dinas dibatasi hanya 4 bidang dan 1 bagian saja.

Menyadari kondisi tersebut maka perlu dilakukan analisis jabatan, sehingga dihasilkan deskripsi jabatan bidang kesehatan yang sesuai dengan kewenangan provinsi yang diatur dalam PP 25 tahun 2000. Deskripsi jabatan ini selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi. Dengan segala keterbatasan yang ada, dalam penelitian ini hanya dilakukan analisis jabatan bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi saja.

Penelitian ini sebagai model berfikir dalam penyusunan struktur organisasi berdasarkan kajian analisis jabatan. Tujuan umum penelitian ini adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan kajian analisis jabatan. Rancangan penelitian ini adalah analisis

kualitatif dari hasil pengisian kuesioner analisis jabatan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada responden (pejabat struktural eselon II dan eselon III serta pejabat struktural eselon IV yang terkait). Analisis dilakukan dengan memperhatikan masukan tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi bidang kesehatan (PP 25 tahun 2000), kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan (SE Menkes nomor: 1107/MENKES/VII/2000), hasil penelusuran dokumen dan hasil FGD. Serta dengan memperhatikan PP 8 / 2003) dan azas-azas pengorganisasian.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, beberapa kewenangan yang mempunyai kesamaan (sasaran, proses, pelaksanaan) dikelompokkan menjadi satu fungsi, sehingga diperoleh 10 (sepuluh) fungsi Dinas Kesehatan. Selanjutnya dilakukan departemenisasi berdasarkan fungsi menurut kesamaan sifat, ruang lingkup dan sasaran menjadi 4 (empat) kelompok, yang nantinya akan disusun menjadi struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi. Bentuk organisasinya adalah matriks, yaitu gabungan lini, fungsional dan staf.

Dalam penelitian ini, dikemukakan 3 (tiga) alternatif struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu: Alternatif 1, Kepala Dinas membawahi 4 (empat) Bidang (Pengembangan Program; Upaya Kesehatan dan Farmakmin; Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya), dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan; Alternatif 2: Kepala Dinas membawahi 3 (tiga) Bidang (Upaya Kesehatan dan Farmakmin; Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya) dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabfung). Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan. Pada alternatif 2, tugas-tugas perencanaan, pengembangan dan evaluasi menjadi tanggung jawab Bidang, dikoordinir dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan kelompok jabatan fungsional. Alternatif 3: dengan mengacu pada rancangan SKN (Depkes, 2003), maka departemenisasi dilakukan berdasarkan Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu: Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), sehingga dalam struktur organisasi yang dikemukakan, Kepala Dinas hanya membawahi 2 (dua) bidang yaitu: Bidang Program Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan serta dibantu Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional

Spesifikasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan adalah: sarjana yang memiliki kemampuan dan kompetensi formal di bidang manajemen kesehatan dengan kualifikasi magister. Telah menempuh pendidikan penjurusan setingkat SPAMEN atau Diklatpim II, pangkat Pembina Utama Muda / Golongan IVc. Ketrampilan kerja: aspek mental dan sosial. Bakat kerja: G (*Intelligence*) dan V (*Verbal Aptitude*), kemampuan kerja: D (DCP: *Direction Control Planning*); F (FIF: *Feeling Idea Fact*); I (INFLU: *Influencing*); D (DEPL: *Dealing with people*). Minat: 1b, 2a, 3a, dan 5b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai seorang manager harus mempunyai keahlian *Human Skill* dan *Conceptual Skill*, serta standar personal: (1) taraf *intelligence* yang setingkat magister, (2) *leadership ability* yang mantap, (3) *communication ability* yang efektif, (4) *moral virtues* yang tinggi, (5) *good judgment*, dan (6) kaya akan *initiative*

berdasarkan kajian analisis jabatan. Rancangan penelitian ini adalah analisis kualitatif dari hasil pengisian kuesioner analisis jabatan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada responden (pejabat struktural eselon II dan eselon III serta pejabat struktural eselon IV yang terkait). Analisis dilakukan dengan memperhatikan masukan tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi bidang kesehatan (PP 25 tahun 2000), kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan (SE Menkes nomor: 1107/MENKES/VII/2000), hasil penelusuran dokumen dan hasil FGD. Serta dengan memperhatikan PP 8 / 2003) dan azas-azas pengorganisasian.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, beberapa kewenangan yang mempunyai kesamaan (sasaran, proses, pelaksanaan) dikelompokkan menjadi satu fungsi, sehingga diperoleh 10 (sepuluh) fungsi Dinas Kesehatan. Selanjutnya dilakukan departemenisasi berdasarkan fungsi menurut kesamaan sifat, ruang lingkup dan sasaran menjadi 4 (empat) kelompok, yang nantinya akan disusun menjadi struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi. Bentuk organisasinya adalah matriks, yaitu gabungan lini, fungsional dan staf.

Dalam penelitian ini, dikemukakan 3 (tiga) alternatif struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu: Alternatif 1, Kepala Dinas membawahi 4 (empat) Bidang (Pengembangan Program; Upaya Kesehatan dan Farmakmin; Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya), dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan; Alternatif 2: Kepala Dinas membawahi 3 (tiga) Bidang (Upaya Kesehatan dan Farmakmin; Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya) dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabfung). Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan. Pada alternatif 2, tugas-tugas perencanaan, pengembangan dan evaluasi menjadi tanggung jawab Bidang, dikoordinir dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan kelompok jabatan fungsional. Alternatif 3: dengan mengacu pada rancangan SKN (Depkes,2003), maka departemenisasi dilakukan berdasarkan Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu: Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), sehingga dalam struktur organisasi yang dikemukakan, Kepala Dinas hanya membawahi 2 (dua) bidang yaitu: Bidang Program Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan serta dibantu Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional

Spesifikasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan adalah: sarjana yang memiliki kemampuan dan kompetensi formal di bidang manajemen kesehatan dengan kualifikasi magister. Telah menempuh pendidikan penjurusan setingkat SPAMEN atau Diklatpim II, pangkat Pembina Utama Muda / Golongan IVc. Ketrampilan kerja: aspek mental dan sosial. Bakat kerja: G (*Intelligence*) dan V (*Verbal Aptitude*), kemampuan kerja: D (DCP: *Direction Control Planning*); F (FIF: *Feeling Idea Fact*); I (INFLU: *Influencing*); D (DEPL: *Dealing with people*). Minat: 1b, 2a, 3a, dan 5b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai seorang manager harus mempunyai keahlian *Human Skill* dan *Conceptual Skill*, serta standar personal: (1) taraf *intelligence* yang setingkat magister, (2) *leadership*

ABSTRACT

Organizational Development Of East Java Provincial Health Office According To Government Regulation Number 25/2000 Based On Job Analysis

Lilik Endahwati

This study was a thinking model in formulating an organizational structure based on job analysis. The objective of the study was to develop an organizational structure of East Java Provincial Health Office (PHO) in the era of decentralization based on job analysis approach. East Java PHO was chosen as the object of study due to the fact that the establishment of East Java PHO (according to Provincial Regulation No. 37 / 2000) was not based on job analysis but on accommodating two institutions i.e. the Provincial Office of Ministry of Health (Kantor Wilayah Kesehatan) and the former Provincial Health Office (Dinas Kesehatan Provinsi). The implementation of Government Regulation No. 8 and 9 / 2003 rose some 'job uncertainty feeling' among managers and staffs of the institution.

Job analysis should be used to answer the organizational restructuring of PHO. This was a qualitative analysis study, where data was obtained by in-depth interviews and group discussion. The samples were structural officers from echelon II, III, and IV of East Java PHO. The result of the study showed that the job description of the Head of PHO can be grouped into general jobs, administrative jobs, and technical jobs (in line with the existing regulation of PP 25/2000 and SE Menkes No. 1107/MENKES/VII/200). An organizational structure of PHO can be constructed by grouping similar task and function. There were 3 alternatives of PHO organizational structure can be suggested.

The Head of PHO should have a qualification as job specification i.e. master in health science, grade IV c, good working capability both mentally and socially. As a top manager, she/he should have a conceptual skill and standard personal requirements: intelligence is at a level of master's degree, a strong leadership, an effective communication ability, a high moral virtues, good judgment, and full of initiatives.

Key words: Job analysis, job description, job specification, organization structure,